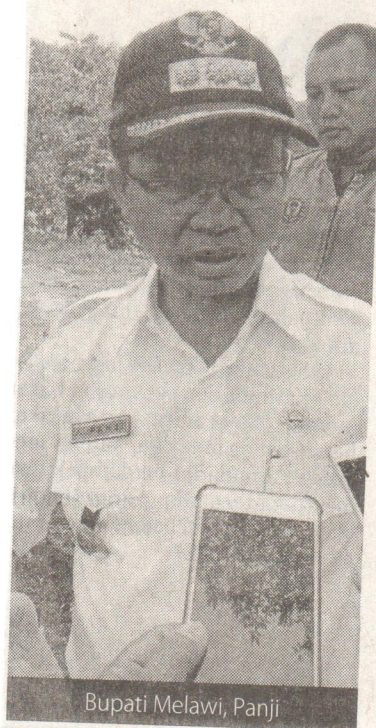




Bupati: Draf APBD Perubahan Tunggu Hasil Audit



Bupati Melawi, Panji

MELAWI-RK. Salah satu agenda penting di DPRD Melawi adalah menyelesaikan pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan 2019, sehingga bisa tuntas sebelum habis masa kerja anggota DPRD.

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD Melawi, Iif Usfayadi mengaku pihaknya sudah menyurati Pemkab Melawi untuk segera menyampaikan KUA PPAS RAPBD Perubahan Melawi Tahun Anggaran 2019 ke DPRD Melawi.

“Walau memang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK belum keluar, kami kira tak menjadi masalah, bila Pemkab menyampaikan draf KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2019 ke DPRD, sambil menunggu LHP ini disampaikan oleh bupati,” ujar Iif, Kamis (8/8).

Ia mengatakan, surat dari DPRD tersebut untuk mengingatkan Pemkab Melawi dimana sesuai jadwal, penyampaian KUA PPAS RAPBD Perubahan tahun berjalan disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Agustus. Pihaknya pun berharap, agar pembahasan anggaran bisa berjalan tepat waktu.

Menurut Iif, pembahasan APBD perubahan masih sangat memungkinkan dilakukan oleh DPRD saat ini. Dengan waktu tersisa kurang lebih satu bulan saja, Iif menilai ketuk palu APBD Perubahan dapat saja terlaksana, tanpa harus menunggu pelantikan dewan baru.

“Yang penting Pemkab dan DPRD sama-sama punya niat untuk menyelesaikan itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Melawi, Panji ditemui sejumlah awak media memastikan akan menyampaikan Draf APBD Perubahan tahun 2019. Namun Pemkab masih akan menunggu hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Melawi tahun anggaran 2018.

“Setelah hasil audit ini sampai, maka kita segera sampaikan APBD Perubahan. Tidak kita mengacu bahwa yang sudah-sudah ini sering terlambat. Tapi kalau kita kompak dan cepat. Tidak banyak hiruk-pikuknya, APBD perubahan itu masih sangat mungkin,” katanya.

Panji juga berharap APBD perubahan pada 2019 ini tetap ada dan dapat dibahas. Persoalan peralihan masa jabatan anggota DPRD Melawi tidak terlalu mengganggu selama semua pihak mau kompak dan pembahasan bisa berjalan baik serta tak menyalahi aturan, maka bisa saja dibahas pada periode DPRD berjalan saat ini.

“Kalau pembahasannya memperhatikan kepentingan masyarakat, sampai September mendatang masih cukup. Masih ada satu bulan,” pungkasnya. **(Ira)**